

# KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2019





BADAN POM

**KINERJA** **BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2019

# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil – hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standarisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka Pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju “BPOM baru”, yaitu BPOM yang terus meningkatkan pelayanan publik dengan kecepatan dan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan, sesuai dengan moto pelayanan BPOM 5S yaitu Sambut dengan Senyum dan Salam yang didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, Maret 2020  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
HIGHLIGHT .....	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN .....	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan .....	5
II. Standardisasi.....	14
III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	17
IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM .....	23
V. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan .....	26
VI. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana .....	28
VII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum) .....	32
VIII. Kerjasama Internasional .....	33
IX. Pengelolaan Anggaran .....	37
X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM.....	37
PENUTUP .....	37
LAMPIRAN .....	38

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	5
<b>Gambar 2.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	5
<b>Gambar 3.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	6
<b>Gambar 4.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	6
<b>Gambar 5.</b>	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	7
<b>Gambar 6.</b>	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	7
<b>Gambar 7.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	8
<b>Gambar 8.</b>	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019 .....	8
<b>Gambar 9.</b>	Profil Laporan Efek Samping s.d. Triwulan IV tahun 2019 .....	9
<b>Gambar 10.</b>	Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan .....	10
<b>Gambar 11.</b>	Total Posts by Network sampai dengan TW IV 2019 .....	17
<b>Gambar 12.</b>	Total Audience by Network Sampai dengan TW IV 2019 .....	17
<b>Gambar 13.</b>	Total Engagement by Network Sampai dengan TW IV 2019 .....	18
<b>Gambar 14.</b>	Total Engagement by Network Sampai dengan TW IV 2019 .....	18



**BADAN POM**

# **HIGHLIGHT**

s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2019

# Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Jakarta / Kamis (17/10/2019)



Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memengaruhi gaya hidup masyarakat dan perilaku konsumen mendapatkan kebutuhan sehari-hari, termasuk Obat dan Makanan. Saat ini masyarakat terbiasa melakukan pembelian produk dan jasa secara *online* (daring). Hal ini menyebabkan celah peredaran produk yang tidak memenuhi syarat semakin besar karena belum diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Strategi dan terobosan metode pengawasan yang tepat perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan di era digital ini.

Badan POM selaku regulator pemerintah sebagai pengawas peredaran obat dan makanan tidak dapat bekerja sendiri untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, khususnya pada jalur *online*. Untuk itu Badan POM menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan *Market Places*.

## Badan POM dan 60 Negara Anggota Codex Godog Peraturan Terkait Cemaran Pangan

Jenewa/ Kamis (24/10/2019)

Risiko peredaran obat ilegal, substandar, dan/atau palsu menjadi semakin meningkat dengan meluasnya perdagangan *online*. *World Health Organization* (WHO) telah membentuk forum kolaborasi global untuk mengatasi peredaran obat substandar dan palsu yang melibatkan sejumlah negara. Indonesia, yang diwakili Badan POM, turut berperan aktif dalam membangun sistem yang meliputi upaya pencegahan (*prevention*), pelaporan deteksi (*detection*), dan respon cepat (*responsive*) untuk mengeradikasi peredaran obat substandar dan palsu.

Badan POM berbagi pengalaman penanganan obat substandar dan palsu pada forum *State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product ke-8* di Markas Besar WHO, Jenewa Swiss (24/10). Penny K. Lukito menyatakan komitmen pemerintah Indonesia sangat besar ditunjukkan dengan Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Oktober 2017.



## Raih Penghargaan APIP Level 3 Penuh, Badan POM Terapkan Fraud Control Plan (FPC) Bersama BPKP

Jakarta / Sabtu (09/11/2019)



Badan POM menyelenggarakan Kampanye Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan melalui acara Ngobrol Asyik Milenial Bersama Badan POM: Makan Sehat Ala Generasi Cerdas, Sabtu (09/11). Acara yang diselenggarakan di Mitra Terrace Jakarta ini, dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito; Deputy FAO Representative di Indonesia, Ageng Hariyanto; dan Guru Besar Teknologi Pangan IPB, Purwiyatno Hariyadi. Acara dihadiri oleh peserta yang merupakan pelajar dari 4 SMA dan SMK di Jakarta, serta blogger di bidang *food and lifestyle*.

Acara ini merupakan salah satu upaya Badan POM untuk membuka wawasan dan memberikan inspirasi kepada generasi milenial agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. "Melalui acara ini, Badan POM mengajak Generasi Milenial untuk menjadi duta pencegahan penyebaran hoaks Obat dan Makanan sebagai sumbangsih dalam memutus mata rantai hoaks di Indonesia," ungkap Penny K. Lukito saat berdialog dengan peserta.

## Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Surabaya / Senin (11/11/2019)

Surabaya - Rapat Evaluasi Nasional Badan POM tahun 2019 yang mengangkat tema "Melalui Evaluasi Kinerja, Kita Tingkatkan Pelayanan Publik yang Efektif untuk Obat dan Makanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Era Industri 4.0" dilaksanakan pada 11-15 November 2019 dihadiri setidaknya 400 orang peserta dari unit pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Kantor Badan POM di kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mewakili Gubernur Jawa Timur.

Pertemuan ini membahas capaian kinerja yang konkret dan terukur serta faktor kunci keberhasilan, isu strategis, tantangan dan *lesson learned* dari capaian tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, fungsi pengawasan yaitu standardisasi, sertifikasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, serta informasi dan komunikasi, dan pengendalian intern. Hasil evaluasi akan menjadi masukan yang sangat penting untuk mempertajam perencanaan Badan POM pada periode pembangunan nasional 2020-2024.



## Bangun Kerjasama, Badan POM Kunjungi Daerah Perbatasan Vanimo, Papua Nugini

### Tangerang/ Senin (02/12/2019)



Tangerang - Badan POM RI bekerja sama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Bareskrim POLRI dan Polsek Teluk Naga mengungkap peredaran obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal termasuk palsu di lima TKP di Kecamatan Kosambi, Tangerang, Senin malam (02/12). Kelima TKP tersebut terdiri dari tiga toko kosmetik, satu toko obat, dan satu rumah tinggal yang dijadikan gudang.

Produk ilegal yang ditemukan antara lain *Tramadol* dan *Hexymer*, Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan termasuk obat daftar G; obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO); dan kosmetik ilegal yang diduga mengandung bahan berbahaya. Total barang bukti yang ditemukan sejumlah 419 item (172.532 pieces) dengan nilai keekonomian total mencapai lebih dari 270 juta rupiah.

## Jaga Transparansi, BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2018

### Jakarta / Kamis (19/12/2019)

Jelang akhir tahun 2019, Badan POM menggelar acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Outlook 2020 di Jakarta, Kamis (19/12). Acara dihadiri tidak hanya oleh Pimpinan Badan POM beserta jajarannya, tetapi juga berbagai mitra kerja dan stakeholders Badan POM.

Pada acara ini juga ditampilkan pameran digitalisasi perizinan yang diikuti oleh beberapa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, penandatanganan *grant agreement* dan *joint workplan* dalam lingkup peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan perwakilan WHO di Indonesia, sosialisasi terkait beberapa program strategis Badan POM, serta konsolidasi dan diskusi akhir tahun yang membahas monitoring dan evaluasi kinerja Badan POM tahun 2019.





**BADAN POM**

# **HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2019

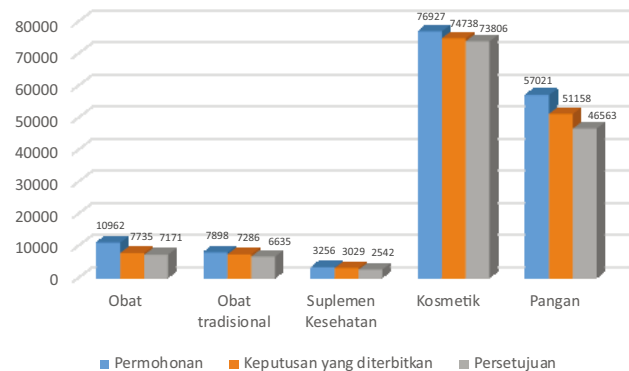
# I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

## Pengawasan *pre-market*

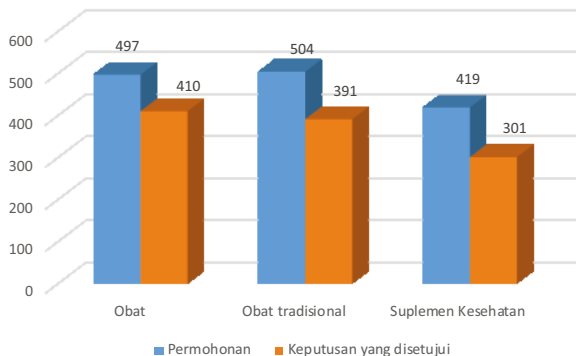
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, telah diterbitkan **143.946** keputusan dan **136.717** persetujuan izin edar dari **156.064** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2019



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan IV Tahun 2019



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, dari 1.420 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.102 (77.60 %) iklan.

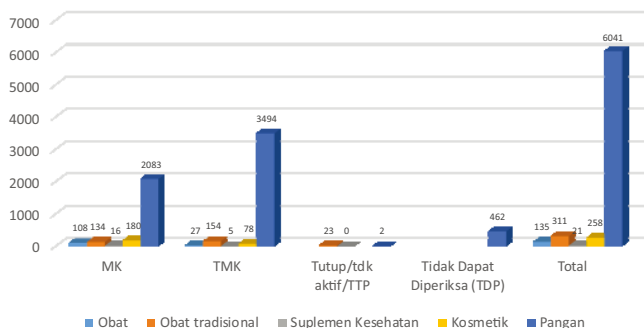
# Pengawasan post-market

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

## 1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

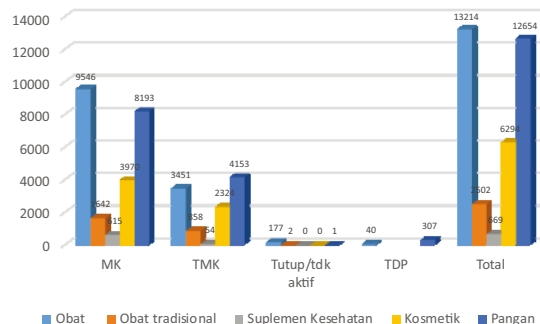
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 telah diperiksa sebanyak **6.766 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **3.758 (55.54%)** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2019

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 telah diperiksa **35.333 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **10.840 (30.68 %)** sarana adalah TMK.

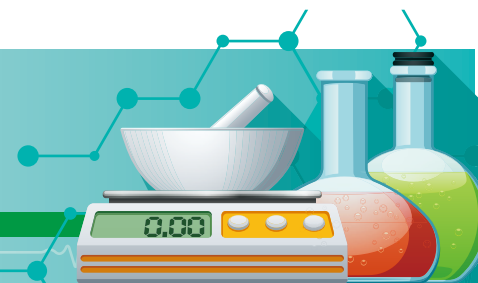


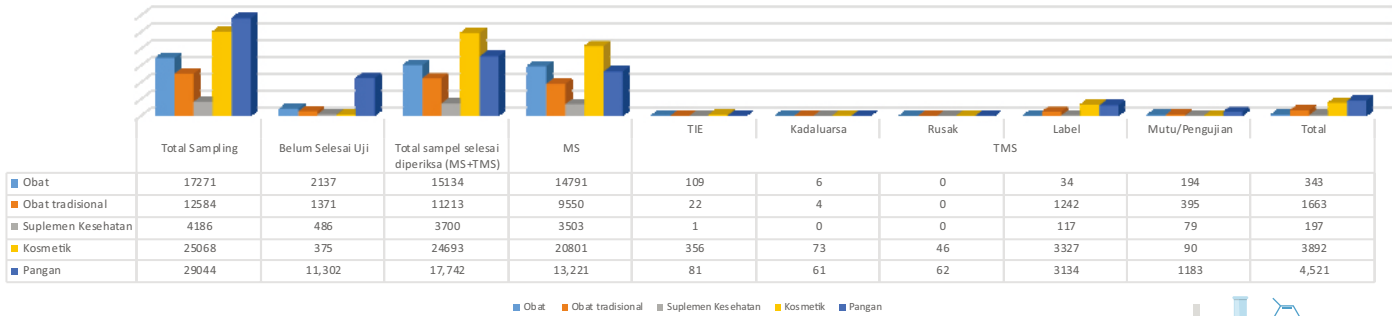
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2019

### Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan

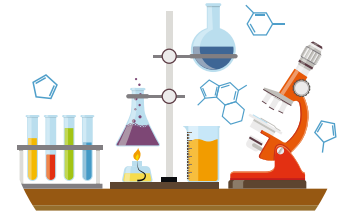
TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan





Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa Izin Edar

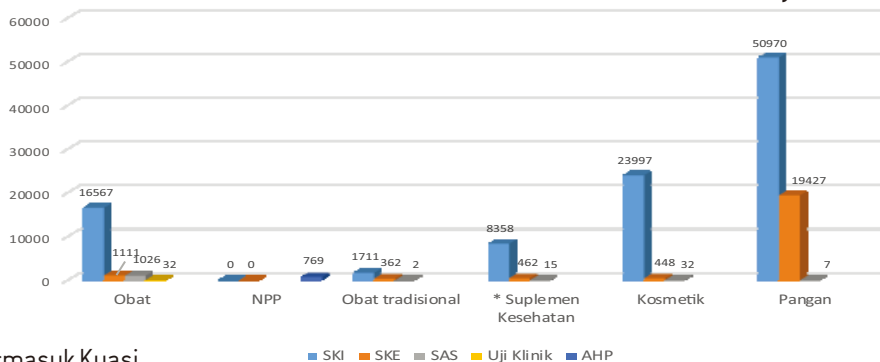
Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2019



Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, dari 88.153 sampel yang disampling terdapat 72.482 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dimana 61.866 (85.35%) sampel memenuhi syarat.

## 3 Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 telah diterbitkan 101.603 SKI, 21.810 SKE, 1.082 SAS, 32 Uji Klinik, dan 769 AHP Obat dan Makanan.



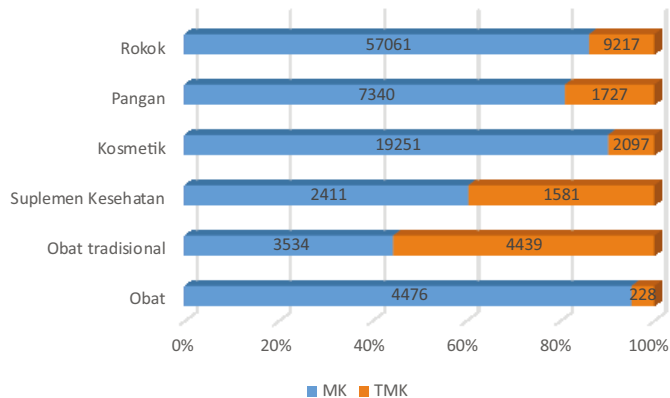
\* Termasuk Kuasi

Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2019



## Pengawasan Iklan

4



Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2019



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, dari 113.362 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 94.073 (82.98%) iklan memenuhi ketentuan.

5

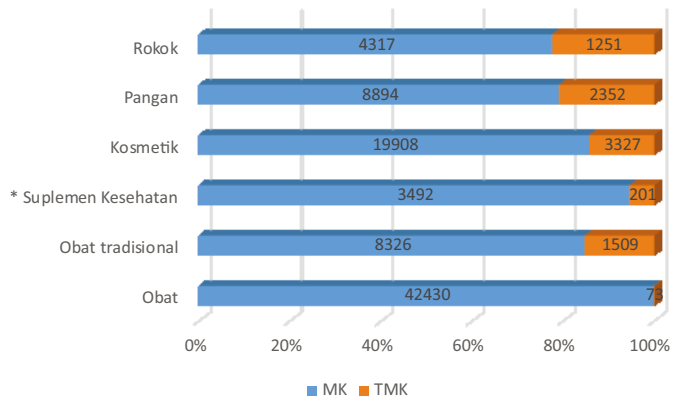
## Pengawasan Label



BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV tahun

2019, dari 96.080 label Obat dan Makanan yang diawasi, 87.367 atau sekitar 90.93% label memenuhi ketentuan.

\* Termasuk Kuasi



Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

## 6

## Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakan lanjut	%
<b>Obat</b>	6148	4846	78.82
<b>Obat Tradisional</b>	78	75	96.15
<b>Suplemen Kesehatan</b>	10	9	90.00
<b>Kosmetik</b>	257	176	68.48

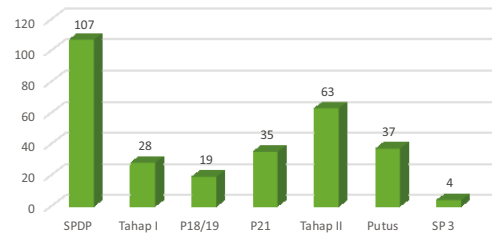
Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan IV tahun 2019



Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak, BPOM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan 23 Desember 2019, PPNS BPOM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 293 perkara. Dari 293 perkara tersebut, 107 perkara masih dalam tahap SPDP, 28 perkara pada tahap I, 19 Perkara pada tahap P19/P18, 35 Perkara pada tahap P21, 63 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), 37 perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan dan 4 perkara diterbitkan SP3.

Perkembangan Perkara Penyidikan  
Seluruh Indonesia



Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana  
Obat dan Makanan

### Operasi Opson VIII

Operasi Opson VIII tahun 2019 menemukan 61 miliar rupiah pangan segar dan pangan olahan tidak memiliki izin edar/illegal dan tidak memenuhi syarat keamanan. Operasi Opson merupakan operasi global di bawah koordinasi International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL, Lyon, Perancis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum maupun pihak berwenang yang terlibat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Dalam Operasi Opson VIII, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Pusat dan Daerah, Ditjen Bea & Cukai, serta Kementerian Pertanian serentak melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, dan penindakan sarana produksi dan distribusi pangan segar dan pangan olahan di seluruh Indonesia (15 Februari-31 Maret). BPOM menyita 1.606 item (826.929 pcs) pangan segar dan pangan olahan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dari 425 sarana yang diperiksa dengan nilai keekonomian 61 miliar rupiah. Temuan didominasi snack (biskuit, wafer, dll) yang sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab.



**A. Kosmetik Ilegal** : Di awal tahun 2019, BPOM berhasil menyita dan mengamankan **kosmetik** tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta Barat. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, menggerebek empat lokasi yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal termasuk palsu di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek.

Dari empat lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, kendaraan, dan dokumen dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah mengemas kembali sabun lokal yang memiliki izin edar BPOM menjadi seolah-olah produk impor dengan merek kosmetik terkenal dan memproduksi kosmetik palsu. Distribusinya tidak hanya di pulau Jawa, tetapi sampai ke kota-kota besar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi seperti Banjarmasin dan Makassar.

Dari hasil pengungkapan, diketahui bahwa tersangka yang berinisial DJ telah melakukan bisnis kosmetik ilegal di lokasi tersebut sejak awal 2018, diperkirakan omzet yang didapatkan mencapai 200 juta rupiah per bulan. Jumlah yang ditemukan sebanyak 53 item terdiri dari 679.153 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 30 miliar rupiah.



**B. Kosmetik Tanpa Izin Edar** : Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Komplek Inkopad Blok G7 No 10, Kel. Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 14 item terdiri dari 230.968 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 7,5M. Dari kedua lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, alat komunikasi dan dokumen.

**C. Pangan Kadulawarsa** : Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Kampung Bulak Kota Depok yang diduga mengganti tanggal kedaluwarsa terhadap pangan olahan. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 92 item terdiri dari 135.737 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 1,27M.

**D. Obat dan Makanan Ilegal** : Pada tanggal 03 September 2019, telah dilaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap Rumah di Jl. Ratna No. 53 RT 004 RW 008, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng.

Dilakukan penindakan terhadap seluruh tempat penyimpanan seisi rumah dan ditemukan produk sediaan farmasi berupa **Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik** yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebanyak 102 jenis item sejumlah 270.550 Pieces dengan nilai ekonomi taksiran barang bukti sebesar ± Rp 6.368.145.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kasus tersebut merupakan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



**E. Pemberantasan Obat TIE** : Pada 02 Desember 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, Korwas PPNS, Bareskrim POLRI dan Polsek Teluk Naga telah melakukan operasi pemberantasan peredaran **obat ilegal** termasuk palsu berlokasi di 5 titik TKP di Kecamatan Kosambi, Tangerang yang terdiri dari 3 toko kosmetik, 1 toko obat dan 1 rumah tinggal yang dijadikan gudang. Dari lima TKP tersebut, petugas menyita ratusan item obat, obat tradisional, dan kosmetik tanpa izin edar/ilegal.

Produk ilegal temuan antara lain Tramadol dan Hexymer, Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan termasuk obat daftar G; obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO); dan kosmetik ilegal yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, pelaku menjual OOT yang sering disalahgunakan secara terselubung dengan kamuflase sebagai toko kosmetik. Selain menjual di toko kosmetik miliknya, pelaku juga mengedarkan ke toko-toko kosmetik di wilayah Dadap Kosambi dengan omzet sekitar belasan juta per hari dan sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Petugas telah memeriksa setidaknya 20 orang saksi terkait temuan ini.

Kasus masih dikembangkan oleh PPNS BPOM untuk mengungkap aktor intelektualnya, serta mendapatkan informasi mengenai sumber/asal-usul produk obat ilegal tersebut. Tindakan mendistribusikan produk ilegal ini melanggar pasal 197 dan pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Tersangka juga dapat dikenakan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.

## **F. Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal** :

Lebih dari 53 miliar rupiah **kosmetik ilegal**, **obat tradisional ilegal**, dan **pangan olahan ilegal** disita Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM di empat gudang pengiriman barang di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan pada 09 Desember 2019. Dari empat gudang tersebut, petugas mengamankan dan menyita 43.071 pieces kosmetik ilegal senilai 17,17 miliar rupiah, 58.355 pieces obat tradisional ilegal senilai 27,98 miliar rupiah, dan 14.533 pieces pangan olahan ilegal senilai 7,21 miliar rupiah. Rincian jumlah item keseluruhan 44 item (29 item kosmetik ilegal, 12 item obat tradisional ilegal dan 3 item pangan olahan ilegal) atau 127.281 pieces.

Kosmetik ilegal yang ditemukan dan disita petugas antara lain Diva Mask, Inno Gialuron, Xtrazex, Princess Hair, dan Vita Micrite 3D All Use. Sedangkan, obat tradisional ilegal yang ditemukan antara lain Detoxic, Resize Gel, dan Hero Active, sedangkan pangan olahan ilegal antara lain Slim Mix Collagen 168 g, Choco mia, Black Latte 100 g. Pelaku diduga melakukan kejahatan peredaran kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan ilegal dengan modus penjualan melalui jasa pengiriman kurir.

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 197 UU Kesehatan jo pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU no 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

## II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



### Obat

Telah disusun 13 (tiga belas) standar obat, dimana 9 (sembilan) standar sudah selesai 100% sedangkan 4 (empat) standar masih berproses.

Berikut 13 (tiga belas) standar obat tersebut:

1. Peraturan BPOM Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi (100%)
2. Revisi Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Indonesia (100,00%)
3. Daftar Obat Komparator Uji Ekuivalensi dan Obat Generik yang Telah Memenuhi Kriteria Bioekivalensi (100%)
4. Revisi Peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100,00%)
5. Standar Obat Non Komedial mengakomodir Standar mutu obat zat aktif baru yang belum ada di Farmakope (100%)
6. Revisi Farmakope Indonesia (100%)
7. Penyusunan Buku Tanya Jawab Farmakope Indonesia (100%)
8. Standar Mutu Produk Biologi (100%)
9. Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker (100%)
10. Revisi Pedoman Teknis CDOB (90,00%)
11. Peraturan BPOM Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (77,78%)
12. Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia (77,78%)
13. Peraturan BPOM tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor NPP Farmasi (71,43%)



### Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 11 standar obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dengan progres mencapai 100% yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Penerapan CPOTB Secara Bertahap Bagi UMKM OT (100%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (100%)
3. Rancangan Pedoman Farmakodinamik Obat Bahan Alam (Pre Klinik) (100%)
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (100%)
5. Pedoman Penilaian Suplemen Kesehatan Yang Mengandung Probiotik (100%)
6. Peraturan BPOM tentang Pengawasan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (100%)
7. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Stabilitas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (100%)
8. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.42.06.10.4556 Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (100%)
9. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika (100%)
10. Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 (100%)
11. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B (100%)

Telah disusun 36 kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yaitu:

1. Kajian Obat Tradisional mengandung Kafein (100%)
2. Kajian Bahan Tambahan Baru Laurocapram (100%)
3. Kajian Bahan Aktif Metil Nikotinat (100%)
4. Kajian Pencantuman Peringatan / Perhatian untuk Produk yang Mengandung *Centella Asiatica p* (100%)
5. Kajian mengenai Peringatan/Perhatian untuk Produk yang Mengandung *Valeriana officinalis radix* (100%)
6. Kajian Kandungan Tanaman Mengandung Kafein (100%)
7. Kajian Bahan Baku Aktif *Arachis hypogea* skin (100%)
8. Kajian Bahan Baku Aktif dari *Antherea pernyi* Geurin-Meneville (Pupa Ulat Sutra) (100%)
9. Kajian Permohonan Informasi tentang Kategori Produk Lancure dan Artimax (100%)
10. Kaji Ulang Persyaratan Batas Kadar Citrinin dalam Produk Obat Tradisional Berbasis Red Yeast Rice (Beras Angkak) (100%)
11. Kajian tentang Bahan Tambahan Baru (Dimethylether, Butana, Propana) untuk sediaan Aerosol Obat Tradisional (100%)
12. Kajian Bahan Kimia Obat Hasil Isolasi/Sintetik yang Berpotensi Disubstitusi untuk Produk Obat Tradisional (100%)
13. Kajian Rasionalisasi Produk yang Mengandung Egg Albumin (100%)
14. Kajian Produk Reparom/Emoflon Herbal Rectal Ointment dan Suppository (100%)
15. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baru *Polypodium leucotomos* (PL) Extract dalam Produk Suplemen Kesehatan (100%)
16. Kajian tentang Penggunaan Istilah Nutrasetikal pada Produk Suplemen Kesehatan (100%)
17. Kajian Plasenta Rusa sebagai Bahan Suplemen Kesehatan (100%)
18. Kajian Produk Kombinasi Caffeine, L-Theanine, dan Taurine dalam Minuman Berenergi (100%)
19. Kajian Regulasi Produk Nutrisi Oral untuk Pasien Malnutrisi dengan Kondisi Gangguan Tertentu (100%)
20. Kajian Kombinasi Baru Hyaluronic Acid dan *Boswellia serrata* (100%)
21. Kajian Klaim Produk Suplemen Kesehatan yang Mengandung Membran Cangkang Telur (100%)
22. Kajian Produk Suplemen Kesehatan Kombinasi Baru Mengandung Resveratrol dan *Vitis venifera* (semen) Extract (100%)
23. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan *Ulfa lactuca* Sebagai Salah Satu Bahan Baku Suplemen Kesehatan (100%)
24. Kajian Kategori dan Klaim Produk yang Mengandung Menaquinone (Vitamin K2-7) Tunggal (100%)
25. Kajian Kombinasi Baru *Butea superba*, *Lepidium pperuvianum chacoon*, *Tribulus terresteris*, Inositol, Vitamin B (100%)
26. Kajian Kombinasi Baru Collagen peptide (fish), *Morinda citrifolia* (Noni) fruit juice, *Cyanara scolymus* leaf extract, *Citrus sinesis* fruit extract, Blueberry juice concentrate, Olive fruit extract, Zinc gluconate dan Vitamin C (100%)
27. Kajian Tentang IFRA (100%)
28. Kajian tentang Halykoo (100%)
29. Kajian tentang Kosmetika Hotel (100%)
30. Kajian tentang Kosmetika Mainan (100%)

31. Kajian tentang Klinik dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Lain menjadi Sarana Kosmetik Golongan B (100%)
32. Kajian tentang Petrolatum (100%)
33. Kajian tentang Serbuk Masker Wajah sebagai Bentuk dan Jenis Sediaan yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika Gol B (100%)
34. Kajian tentang Pepaer Somniverum Seed sebagai Bahan Kosmetika (100%)
35. Kajian tentang Produk Kosmetika secara Mesoterapi (100%)
36. Kajian tentang Keong Bakau (100%)

## Pangan

Telah disusun 14 peraturan, standar, maupun pedoman pangan olahan, dengan progres mencapai 100% yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (100%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus (100%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas (100%)
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Produk PKGK (MP-ASI) (100%)
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang Diproduksi oleh UMK (Usaha Mikro dan Kecil) (100%)
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (100%)
7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan (100%)
8. Pedoman Formaldehide Alami pada Pangan (100%)
9. Pedoman tentang Kemasan Daur Ulang (100%)
10. Pedoman Implementasi Peraturan Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan (100%)
11. Pedoman Penilaian Mutu Gizi dan Non Gizi Pangan (100%)
12. Pedoman Label Pangan Olahan (100%)
13. Pedoman Perhitungan Karakteristik Dasar Kategori Pangan Olahan (100%)
14. Spesifikasi & Penggunaan Bahan Dasar Permen Karet/Gum Base (100%)



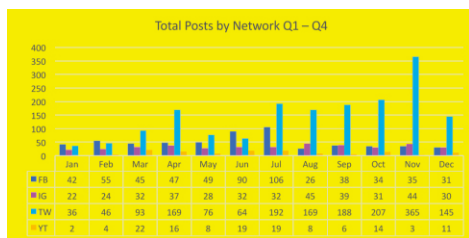
### III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 64 (enam puluh empat) siaran pers dan 11 (sebelas) penjelasan/klarifikasi BPOM terkait isu Obat dan Makanan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 12 (dua belas) kali talkshow atas permintaan media televisi dan 56 (lima puluh enam) kali wawancara pimpinan BPOM dengan media.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun *official Facebook Fanpage, Twitter, Instagram* dan *YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah followers secara positif.

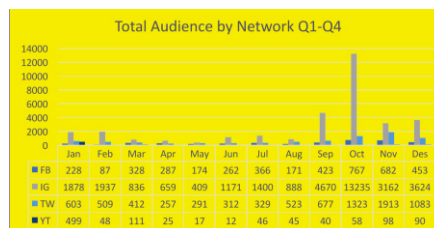
Pada triwulan IV tahun 2019, aktivitas *maintaining* media sosial pada 4 *platform* media sosial yaitu *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Youtube* mengalami peningkatan dibanding triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tahun 2019. Total *posting* keempat *platform* pada triwulan IV tahun 2019 meningkat sebanyak 950 *posts*, dibanding triwulan III tahun 2019 meningkat sebanyak 868 *posts*, triwulan II tahun 2019 sejumlah 635 *posts* dan triwulan I tahun 2019 sejumlah 423 *posts*.



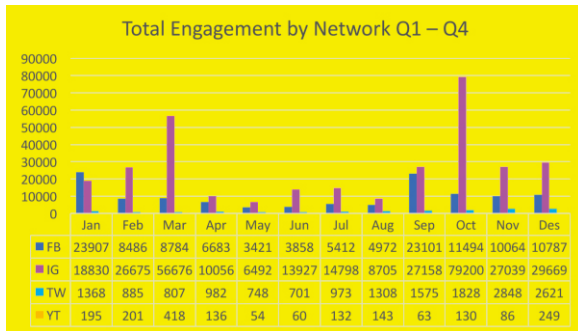
Gambar 11. Total Posts by Network sampai dengan TW IV 2019

Pada triwulan IV, *Twitter* memiliki aktifitas tertinggi sebanyak 717 *tweets* dibanding dengan tiga triwulan sebelumnya dengan dominasi tertinggi berurutan di bulan November, Oktober, Juli, September dan Agustus. *Post* tertinggi kedua adalah *Instagram* sebanyak 105 *posts*. Kemudian *Facebook* yang juga memiliki jumlah *post* tertinggi 100 *posts* dan *Youtube* dengan penayangan 28 video.

Sementara itu pertumbuhan *audience* pada triwulan IV tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 26.488 *audiences*. Sementara triwulan III tahun 2019 sebanyak 9.578 *audiences*, triwulan II tahun 2019 hanya 3.876 *audiences* dan triwulan I tahun 2019 sebanyak 7.476 *audiences*. Peningkatan signifikan terjadi pada *Instagram* 20.021 *audiences*, diikuti *Twitter* 4.319 *audiences*, *Facebook* 1902 *audiences*, dan *Youtube* 246 *audiences*.



Gambar 12. Total Audience by Network sampai dengan TW III 2019



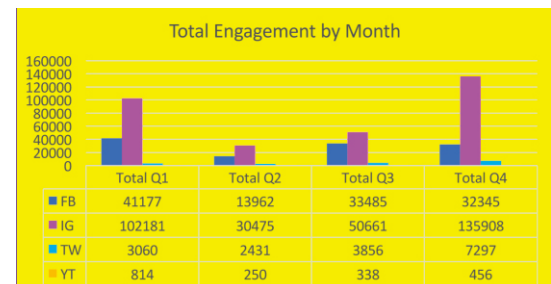
Gambar 13. Total Engagement by Network sampai dengan TW IV 2019



Sementara itu pertumbuhan *audience* pada triwulan IV tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 26.488 *audiences*. Sementara triwulan III tahun 2019 sebanyak 9.578 *audiences*, triwulan II tahun 2019 hanya 3.876 *audiences* dan triwulan I tahun 2019 sebanyak 7.476 *audiences*. Peningkatan signifikan terjadi pada *Instagram* 20.021 *audiences*, diikuti *Twitter* 4.319 *audiences*, *Facebook* 1902 *audiences*, dan *Youtube* 246 *audiences*. Secara total *audiences Instagram* hingga triwulan IV tahun 2019 mencapai 93,5K, disusul *Twitter* 36,7K, *Facebook* 12,3K, dan *Youtube* 1,3K.

Aktivitas media sosial paling aktif dengan pertumbuhan *engagement* paling tinggi terjadi pada *platform Instagram* sebanyak 135.908 *engagement*, *Facebook* 32.345 *engagement*, *Twitter* 7.297 *engagement*, dan *Youtube* 456 *engagement*. Pertumbuhan *engagement Instagram* dan *Facebook* tertinggi di bulan Oktober, disusul Desember dan November. Sedangkan *Twitter* tertinggi pada November disusul Desember dan Oktober. Secara keseluruhan *engagement* tertinggi terjadi di bulan Oktober, disusul Desember dan November.

Secara keseluruhan selama triwulan I hingga triwulan IV tahun 2019, *engagement* tertinggi terjadi pada Oktober, dan terendah pada Mei.

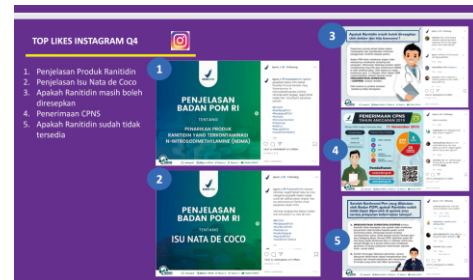


Gambar 14. Total engagement by Month sampai dengan TW IV 2019

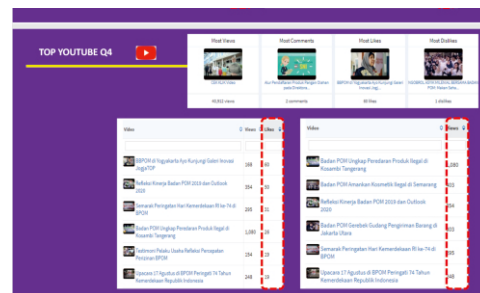
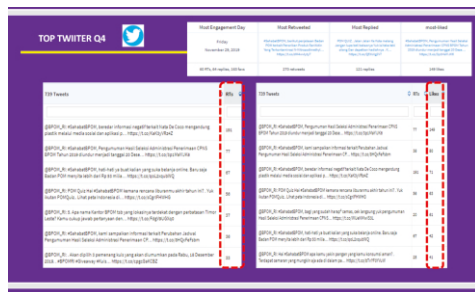
Top Engagement Facebook kategori *most liked* dan *most engaged users* terdapat pada konten Kunjungan Kerja Kepala BPOM dalam Pameran Coklat ke Perancis, kategori *most commented* pada konten Quiz, kategori *most shared* pada konten Penjelasan BPOM terkait Penarikan Produk Ranitidin.

Pada Instagram, konten Penjelasan BPOM terkait Penarikan Produk Ranitidin menjadi *top engagement*. Secara detail *top engagement* kategori *most liked*, *most impressions*, *most commented*, dan *most reach* terdapat pada konten Penjelasan BPOM terkait Penarikan Produk Ranitidin.

Sedangkan video Youtube BPOM selama periode triwulan IV tahun 2019 dengan *engagement rate* tertinggi yaitu BPOM Ungkap Peredaran Produk Ilegal di Kosambi Tangerang dengan jumlah view mencapai 1.080 views dan 26 likes



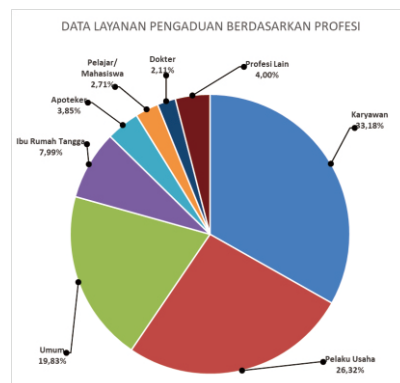
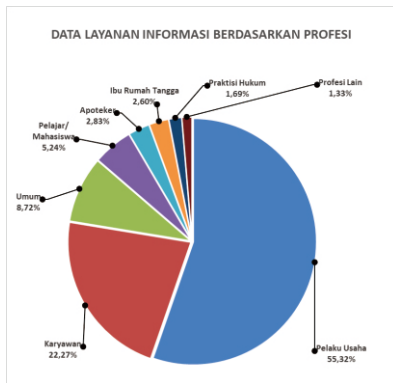
Pada *twitter*, *tweet* mengenai Penjelasan BPOM terkait Penarikan Produk Ranitidin merupakan *tweet* dengan *engagement user* tertinggi dalam bentuk *retweet* (270 *retweets*), konten Quiz dengan 121 *replies*, dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS sebanyak 149 *likes*.



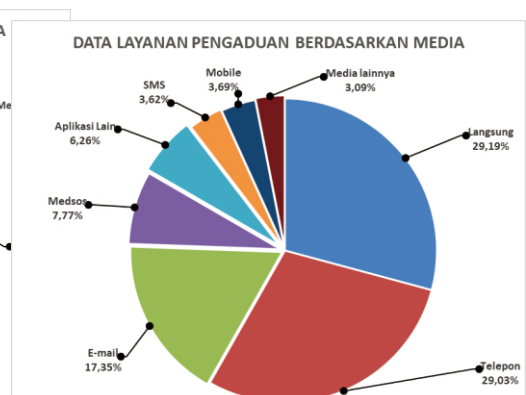
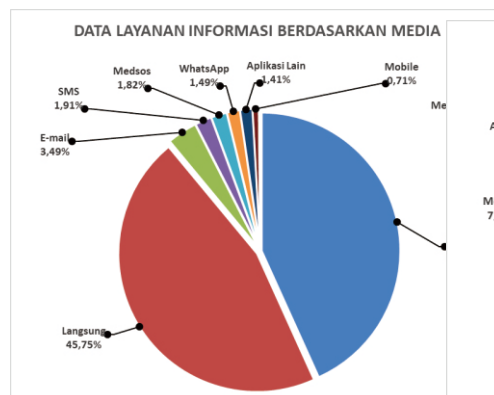
Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data layanan informasi dan pengaduan masyarakat pada periode Januari-Desember tahun 2019, menunjukkan BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 sebanyak 38.833 layanan, dimana 37.507 (96,59%) layanan permintaan informasi dan 1.326 (3,41%) layanan pengaduan.

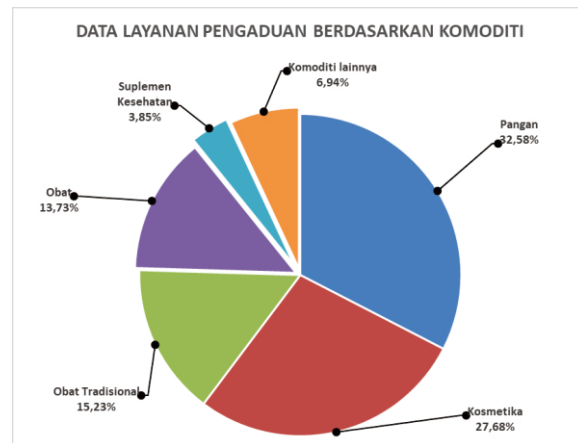
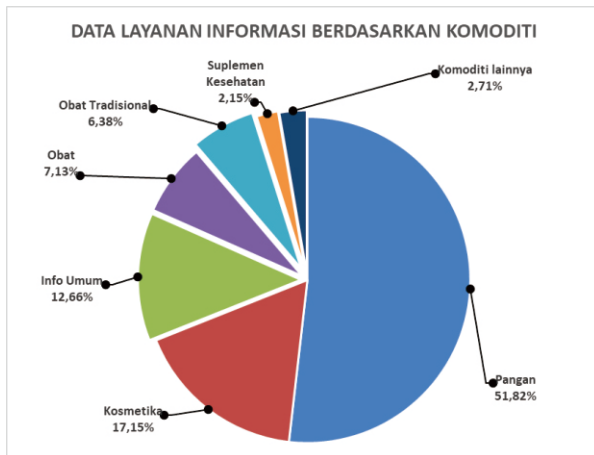
Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 20.749 (55,32%) layanan dan karyawan sebanyak 8.351 (22,27%) layanan. Adapun layanan pengaduan sebagian besar dari karyawan sebanyak 440 (33,18%) layanan dan pelaku usaha sebanyak 349 (26,32%) layanan.



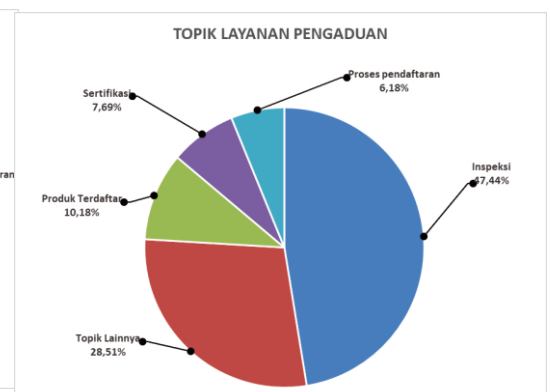
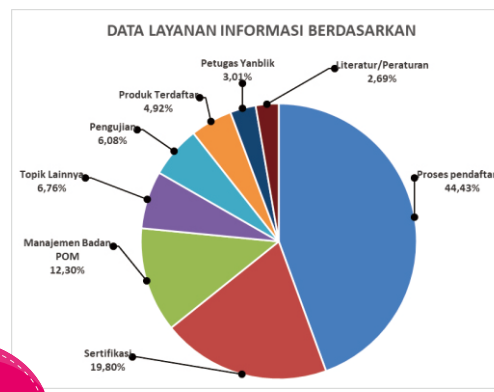
Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu dengan datang langsung sebanyak 17.160 (45,75%) layanan dan melalui telepon sebanyak 16.223 (43,25%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu dengan datang langsung sebanyak 387 (29,19%) dan melalui telepon sebanyak 385 (29,03%) layanan.



Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 19.436 (51,82%) layanan dan kosmetika sebanyak 6.432 (17,15%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diajukan juga yaitu pangan sebanyak 432 (32,58%) layanan dan kosmetika sebanyak 367 (27,68%) layanan.



Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 16.664 (44,43%) layanan, proses sertifikasi sebanyak 7.427 (19,80%) dan manajemen BPOM sebanyak 4.614 (12,30%) layanan. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan sebagian besar yaitu tentang inspeksi sebanyak 629 (47,44%) layanan.



# Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2019

25

KIE Langsung  
ke Masyarakat

- KIE di area CFD dalam rangka HUT BPOM KE-18 Tahun 2019
- *Millennials Talk* "Milenial Cerdas, Obat dan Makanan Aman", Medan
- KIE di Sarana Ritel "Ayo Cek KLIK, Sebelum Belanja"
- KIE Lintas Sektor di Tulungagung, Blitar, Purbalingga (3 Keg), Trenggalek, Pacitan (2 Keg), Kediri (4 Keg), dan Bojonegoro (3 Keg)
- KIE Tomas di Bogor, Bekasi, Cirebon, Grobogan, dan Semarang
- KIE Generasi Emas Kendari dan Mataram

Pameran

13

APTISI GELAR KAMPUS (2 Keg), PIT IAI, Hari Konsumen Nasional, KOWANI EXPO, E-Kiosk dalam rangka Kinerja BPOM tahun 2016-2019, RITECH Expo, Bandung *Food and Health Expo*, Puspiptek Expo, ICAPPS, *Indonesia Science Expo*, Hari Kesehatan Nasional 2019, dan *The 5th Asian Young Pharmacists Group (AYPG)*

KIE kunjungan  
Mahasiswa/  
Pelajar

11

Universitas Ngadi Waluyo, SMA Yasporbi, Institut STIAMI, Fakultas Farmasi UNPAD, PSAF FFUI, Fakultas Farmasi UI (2 Keg), IIK Strada Kediri, SMKN 7 Bandar Lampung, Sekolah Perkumpulan Mandiri, dan Sekolah Tinggi Perikanan

29

Siaran Pers/  
Penjelasan/  
Klarifikasi Berita

Diantaranya:  
produk ilegal, penarikan obat antihipertensi, obat keras yang dijual *online*, penipuan yang dipublikasikan melalui *website* dan media sosial BPOM  
Pangan Disita dalam Operasi Opson VIII-2019, Sidang *Codex Committee On Contaminants In Foods Ke-13*, BPOM Lindungi Masyarakat Selama Ramadhan,

Badan POM  
Hadir Melayani dan Melindungi Masyarakat Pulau Sumba, Peredaran Produk Krupuk Kulit Babi yang Berlogo Halal, Kantong Plastik Kresek, Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Daring, Badan POM Gandeng Asosiasi *E-Commerce* dan *Marketplace* Indonesia, Badan POM Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Obat dan Makanan, *World Food Day*-Makan Sehat Ala Generasi Cerdas,

Wawancara/  
talkshow media

29

Talkshow dan Wawancara Pimpinan Badan POM di antaranya dengan:  
Stylo.id, Jawa Pos, Bukalapak.com, Bisnis Indonesia, RCTI, TV One Koran Tempo, Tirto.id, Tempo, Yokatta, Kompas.com, SCTV, Indopos, Kontan, JakTV, News Story Insight Metro TV, DAAI TV, INews Siang, Jakarta Post, dan Gatra.

Komunikasi, Informasi,  
& Edukasi  
**KIE**  
Obat dan makanan

Tahun 2019  
Jumlah Total Kegiatan :  
**154**

Pengelolaan  
media sosial

6

Media sosial BPOM, HaloBPOM, dan PPIID

Subsite

2

Subsite [ulpk.pom.go.id](http://ulpk.pom.go.id)  
dan [ppid.pom.go.id](http://ppid.pom.go.id)

ILM di Sarana  
Transportasi  
Umum

4

*Car Half Body Wrap* dan ubitop taksi *online*, Cover Seat KA Senja utama, kelas eksekutif dan ekonomi premium (Jakarta-Yogyakarta) dan KA Tawang Jaya, kelas ekonomi premium (Pasar Senen-Semarang)

32

Advertorial/Video/  
ILM di media  
massa dan  
elektronik

Video animasi "Hoax Produk Terbakar", "Hoax 10 item obat" "Kosmetik *online*", "HaloBPOM 1500533", "Badan POM untuk Negeri", *Media Outlook*, Liputan Khusus HUT Badan POM RI, 3 Tahun Kinerja di Metro TV, Video Kinerja 3 Tahun BPOM, Reporter Cilik di Media Indonesia, BPOM Dorong Industri Jamu dan Fitofarmaka Berdaya Saing, UMKM Berdaya Saing di I Break, Berita Satu KIE Kosmetik Aman Atau Menuai Bencana,

KIE melalui 9 jaringan Radio Prambors, Radio MNC Trijaya, Advertorial tentang Obat dan Makanan, Majalah APTISI, Majalah Keuangan (Standar Pelayanan Registrasi Pangan Olahan), Media Indonesia Reformasi Badan POM, Gatra (Dorong Daya Saing Produk UMKM Nasional), Komik "Yux Jadi Anak Sehat dan Cerdas", *Influencer* "Ananda Omesh", "Ussy Sulistiwanti", dan "Rio Febrian".

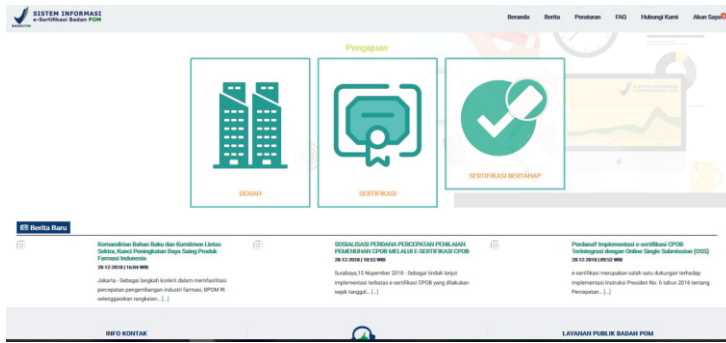
Mobil HoloBPOM

3

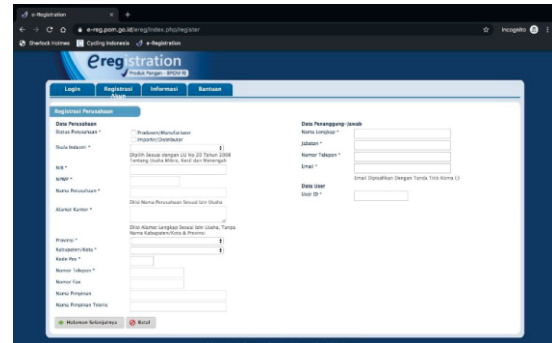
CFD dalam rangka HUT BPOM, *World Food Safety Day*, dan Ayo Buang Sampah Obat



## IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM



Pengembangan Aplikasi E-Sertifikasi

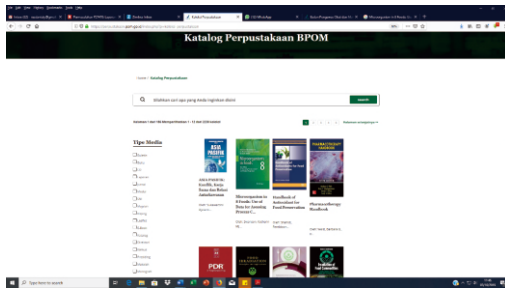


Pengembangan Aplikasi E-Registrasi Pangan



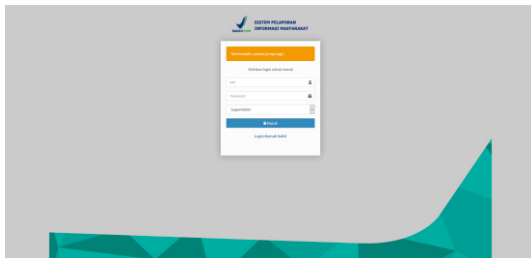
Pelaksanaan Workshop Implementasi 2D Barcode di Bandung



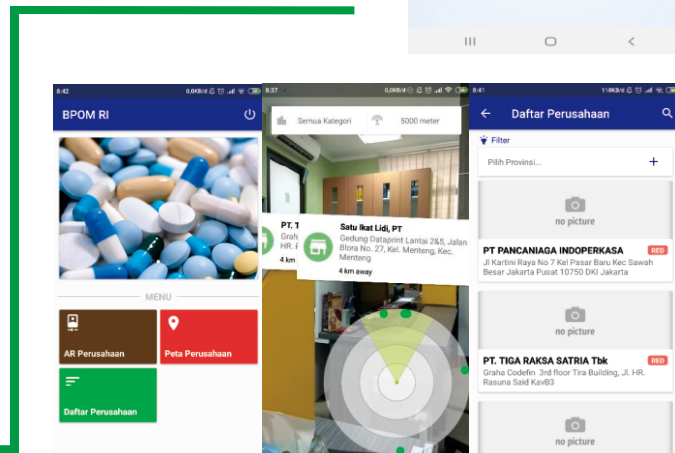


Pengadaan buku pustaka baik tercetak maupun elektronik (e-book) untuk mempermudah pengguna dalam mengakses koleksi yang bisa diakses pada subsite <http://perpustakaan.pom.go.id/>

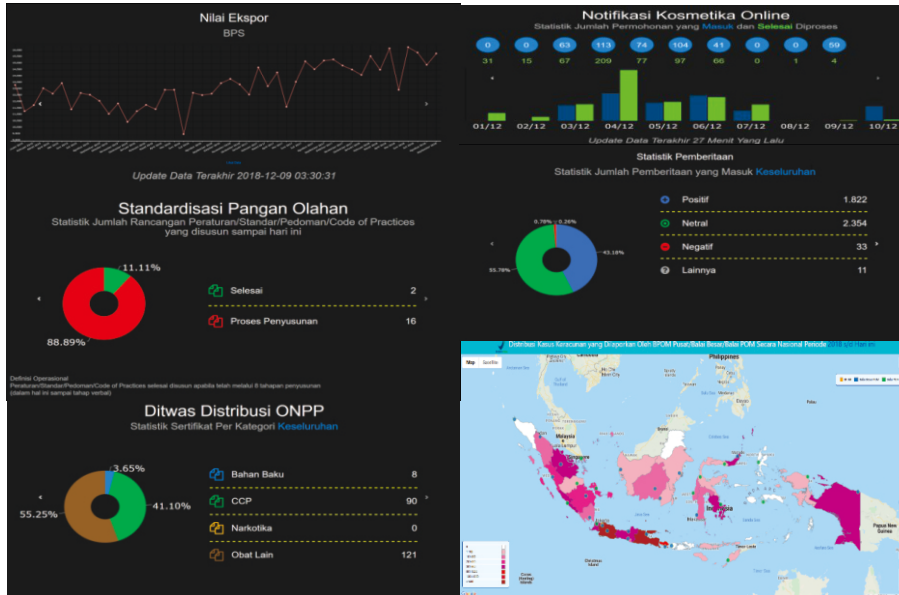
Pengembangan aplikasi barang bawaan penumpang (SipBanteng) dan telah melalui tahapan pengujian *System Integration Test* dan *User Acceptance Test*. Aplikasi SipBanteng telah berjalan dengan baik dan kedepannya akan dilakukan ujicoba terbatas. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat terkumpul data pemasukan obat dan makanan yang dibawa sebagai barang tentengan untuk dapat dikaji terhadap keamanan produk yang selama ini masuk melalui barang tentengan.



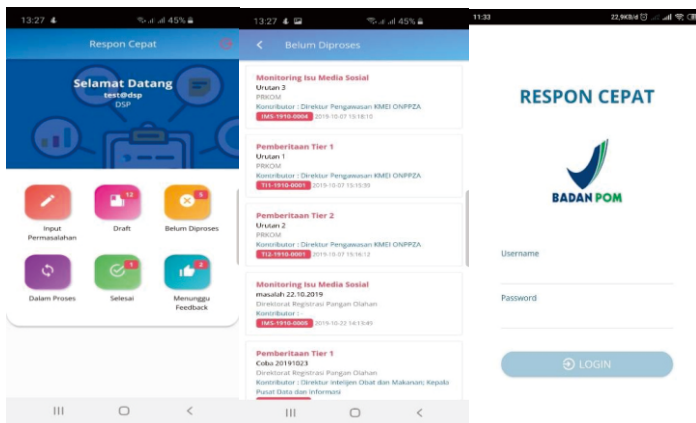
Pada Triwulan IV, sudah diselesaikan tepat waktu pengembangan aplikasi SPIMKer KLB KP. Selain itu data kasus keracunan yang dilaporkan pada TW IV sebanyak 491



Aplikasi Radar (Augmented Reality System) adalah sebuah instrumen yang dibangun untuk dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan seperti inspeksi dan sertifikasi, dengan menyediakan identitas atau profil sarana obat dan makanan yang disajikan dalam visual peta geospasial dan data uraian singkat. Pengembangan pada tahun 2019 dilakukan terhadap penyempurnaan fungsi dan penambahan fitur seperti navigasi ke lokasi sarana yang dituju, baik pada versi mobile untuk pengguna, maupun versi web untuk role administrator dan monitoring. Pengembangan juga dilakukan terhadap aliran data untuk kebutuhan pemanfaatan aplikasi radar.



Telah terdapat lebih dari 40 informasi strategis yang ditayangkan pada Dashboard BPOM Command Center dalam bentuk tayangan yang bervariasi, di antaranya adalah statistik dalam grafik batang, grafik lingkaran, tabel, monitoring SLA, peta sebaran, dan peta geospasial.



Pada tahun 2019, aplikasi respon cepat telah dikembangkan ke dalam versi mobile (Android). Pengembangan versi mobile termasuk penambahan fitur *pop-up notification* yang muncul setiap kali terdapat isu/permasalahan baru atau terdapat aksi baru pada isu/permasalahan, dan *chat* baru pada suatu isu/permasalahan. Pengembangan juga dilakukan pada versi web untuk penyempurnaan fungsi.

## V. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2019, telah ditetapkan 36 (tiga puluh enam) Peraturan Badan POM, 98 (sembilan puluh delapan) Keputusan Kepala Badan POM, 129 (seratus dua puluh sembilan) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

### 1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:  
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

### 3 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:  
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan  
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan  
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

### 36 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM :

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015–2019
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BPOM
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPOM
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan BPOM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan BPOM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tentang Bahan Tambahan Pangan
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tentang Cemaran Dalam Kosmetika
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tentang Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat



16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tentang Kemasan Pangan
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Pangan Olahan
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 tentang Perubahan atas PerBPOM No 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
26. Peraturan Badan POM Nomor 26 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika
27. Peraturan Badan POM Nomor 27 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM
28. Peraturan Badan POM Nomor 28 tentang Bahan Penolong Dalam Pengolahan Pangan
29. Peraturan Badan POM Nomor 29 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM
30. Peraturan Badan POM Nomor 30 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM
31. Peraturan Badan POM Nomor 31 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan BPOM
32. Peraturan Badan POM Nomor 32 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional
33. Peraturan Badan POM Nomor 33 tentang Perubahan atas PerBPOM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM
34. Peraturan Badan POM Nomor 34 tentang Kategori Pangan
35. Peraturan Badan POM Nomor 35 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi
36. Peraturan Badan POM Nomor 36 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker



## VI. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

### Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja UPT terdiri atas:

- a. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM

Penataan OTK BPOM merupakan dampak dari pembentukan 3 (tiga) UPT di lingkungan P30MN BPOM. Ruang lingkup perubahan meliputi:

- 1) penyesuaian tugas dan fungsi pengujian dan penindakan yang diselenggarakan oleh UPT Balai Besar, Balai, dan Loka POM sebagai berikut:
  - a) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
  - b) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
  - c) pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- 2) perubahan Lampiran Lokasi dan Wilayah Kerja UPT di Lingkungan BPOM di antaranya Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat diubah menjadi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan nomenklatur Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku

- b. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Peraturan BPOM ini merupakan dasar pembentukan 3 (tiga) UPT di lingkungan P30MN BPOM, terdiri atas:

- 1) Balai Pengujian Produk Biologi;
- 2) Balai Kalibrasi;
- 3) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.



## Audiensi Kepala BPOM dengan Menteri PANRB

Audiensi Kepala BPOM dengan Menteri PANRB dilaksanakan tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka kelembagaan dan SDM Aparatur di lingkungan BPOM. BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan di Indonesia memiliki sistem pengawasan yang telah diakui secara internasional oleh *World Health Organization* (WHO). Oleh karena itu, upaya penguatan BPOM penting dan mendesak dilakukan melalui payung hukum yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang tengah berproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.



BPOM siap menyesuaikan postur struktur organisasi sesuai arahan Presiden RI dalam rangka penyederhanaan birokrasi dengan pendampingan dari Kementerian PANRB melalui pengalihan jabatan administrator (pejabat struktural eselon 3) dan pengawas (eselon 4) menjadi jabatan fungsional. Turut hadir Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian P A N R B Rini Widyanitini,

Plt. Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani, Inspektur Utama BPOM Elin Herlina, Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM Riati Anggriani, dan Kepala Biro SDM dan Umum BPOM Rita Mahyona.

## Surveilan QMS ISO 9001:2015



Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.

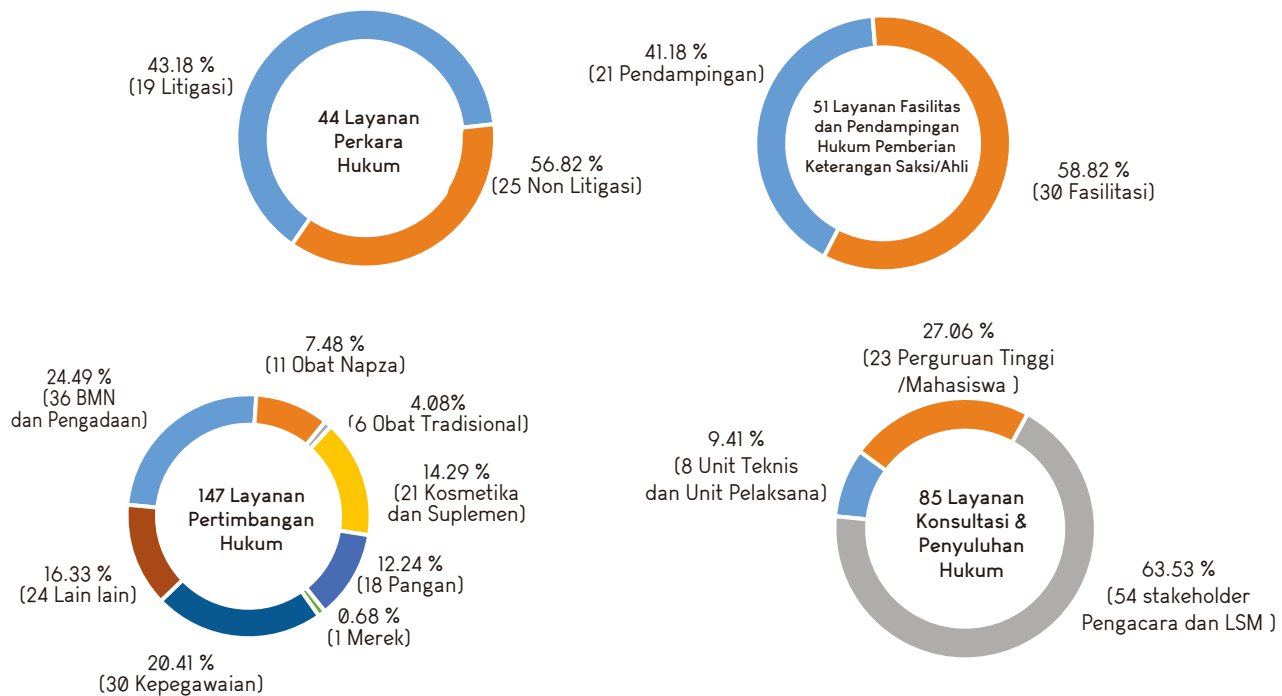
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) yang dilakukan secara konsisten oleh BPOM pada tahun 2019 dibuktikan dengan perolehan 64 (enam puluh empat) sertifikat, terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, dan 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM pada kegiatan Surveilan, termasuk Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

## VII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

### Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 327 layanan yang terdiri dari :



## VIII. Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Berikut kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan IV 2019, diantaranya:

### 1. 17 Oktober 2019 : Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce

#### Indonesia (idEA) dan Market Place

Peredaran produk obat dan makanan secara daring merupakan tantangan pengawasan yang dihadapi oleh Badan POM. Penjualan obat dan makanan secara daring memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk ilegal. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2019, Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan beberapa *Market place* (Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Halodoc dan Klik Dokter), sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan, pengiriman, dan iklan penjualan produk obat dan makanan yang beredar secara daring.

Untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan secara daring, telah disusun rancangan Peraturan Badan POM yang mengatur peredaran obat dan makanan secara daring. Peraturan ini mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme *business consumer*, yaitu pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dari pelaku usaha sampai produk tersebut diterima oleh konsumen, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada mereka yang menggunakan produk yang dijual pada toko daring.

Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, pemberantasan dan pencegahan peredaran obat dan makanan secara daring semakin intensif dan pihak *market place* dapat lebih responsif dan kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan Badan POM.

### 2. 22-31 Oktober 2019 : Kunjungan Kerja Kepala Badan POM dan Delegasi ke Swiss, Italia, dan Perancis

Badan POM telah melakukan kunjungan kerja ke Jenewa, Swiss dalam rangka memenuhi undangan dari WHO untuk menghadiri *Pertemuan Member State Mechanism (MSM) on Substandard and Falsified Medical Products (SFMP)* ke-8. Pertemuan MSM on SFMP merupakan forum kolaborasi global yang melibatkan 52 negara anggota WHO dan bertujuan untuk mengatasi dan menjawab berbagai tantangan/resiko maraknya peredaran obat substandar dan palsu yang semakin meluas dengan perdagangan *online*, sehingga hal ini menjadi perhatian serius dunia. Dalam pertemuan ini Kepala Badan POM memaparkan pengalaman dan laporan hasil pelaksanaan WHO *Pilot Project*, serta menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia yang sangat besar dalam penanganan obat substandar dan palsu, yang ditunjukkan dengan Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo pada Oktober 2017. Disamping itu, Badan POM juga melakukan kunjungan ke Soho Flordis International (SFI) Group yang berada di Lugano, Swiss dalam rangka memperluas jejaring internasional dan berbagi pengetahuan tentang teknologi modern pengembangan bahan-bahan berkualitas melalui uji klinis sehingga menghasilkan obat herbal yang berkualitas tinggi.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dimana sekitar 9.600 spesies dari 30.000 spesies tanaman adalah tanaman obat. SFI merupakan perusahaan inovator obat-obatan herbal yang dimiliki oleh Grup SOHO dari Indonesia. Dialog konstruktif dengan SFI akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Soho Indonesia dan Badan POM untuk membahas langkah-langkah strategis pengembangan Obat Herbal dan Jamu.

Dalam rangkaian ini juga, Badan POM melakukan kunjungan ke Italia dan Perancis. Kunjungan ini berkaitan erat dengan usaha Badan POM dalam mendorong daya saing produk nasional. Kepala Badan POM melakukan pertemuan dengan perwakilan dari *The Triffini & Regee*, yaitu industri farmasi yang telah berdiri sejak tahun 1917 yang memproduksi suplemen kesehatan dan alat kesehatan. Badan POM melakukan diskusi tentang bagaimana industri suplemen kesehatan dapat menerapkan teknologi yang cukup maju dan inovatif sehingga menghasilkan karakteristik khusus seperti kontrol pelepasan zat aktif secara tepat; stabilitas produk secara berkala; dan rasa yang semakin baik. Badan POM juga mendapatkan masukan tentang insentif yang diterima oleh industri suplemen kesehatan yang dapat mendorong produksi suplemen kesehatan dengan dossier teknis termasuk dokumentasi medis dan ilmiah untuk mendukung komunikasi dengan tenaga medis dan pelanggan, studi stabilitas. Badan POM juga berbagi pengalaman mengenai pengembangan obat herbal yang nantinya dapat menjadi referensi dalam penyusunan program Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Paris dilakukan dalam rangka mendukung produk cokelat produksi UMKM sehingga dapat bersaing di pasar internasional, khususnya terhadap 5 (lima) peserta produsen cokelat yang mewakili Indonesia mengikuti *Exhibition Salon Du Chocolat* tanggal 30 Oktober – 3 November 2019. Pameran tersebut diikuti oleh 500 peserta produsen cokelat dari 60 negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh PT Timor Mitraniaga dari NTT, PT Aneka Cokelat Kakao, PT Bali Cokelat, PT Ewwon Indonesia dan Biji Kakao Trading Ltd. Dalam hal ini, Badan POM telah memberikan fasilitasi pengurusan ijin atau registrasi produk cokelat Indonesia sehingga dipastikan bahwa setiap produk makanan khususnya produk cokelat yang diedarkan telah melalui proses penilaian yang ketat untuk memberikan jaminan keamanan dan kualitas.

### 3. 5-6 Oktober 2019 : Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Palestina Tahun Kedua (2019) di bawah Program Prioritas Nasional (ProPN)

Program Kerja Sama Selatan-Selatan Badan POM untuk Palestina tahun kedua dengan tema “*Training on Good Regulatory Practice in Medicines*” telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Oktober 2019 bertempat di Amman, Yordania. Program ini diikuti oleh 14 (empat belas) orang regulator obat Palestina dengan latar belakang bidang farmasi dan kimia dan 2 (dua) orang regulator Yordania sebagai wujud kerja sama implementasi *Letter of Intent* antara Badan POM dan *Jordan FDA*. Program ini merupakan perwujudan dari komitmen Badan POM RI dalam mendukung komitmen Pemerintah RI dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional (ProPN) di antara negara-negara berkembang. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk bantuan yang berkelanjutan untuk membangun sistem pengawasan obat di Palestina yang saat ini belum memiliki lembaga pengawas obat secara mandiri. Disamping memberikan bantuan teknis kepada regulator Palestina, Badan POM juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina di Amman, Yordania berupa peralatan medis, obat-obatan, selimut, baju hangat, dan makanan minuman bergizi dengan total bantuan senilai kurang lebih 116 ribu USD.

Badan POM juga mengadakan business meeting untuk memfasilitasi pertemuan antara regulator dan pelaku usaha Indonesia, Palestina dan Yordania. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjajaki pasar obat dan makanan Palestina dan Yordania baik dari sisi regulasi, akses perijinan dan jaringan bisnis guna mendorong daya saing industri farmasi untuk keperluan ekspor. Bersamaan dengan hal tersebut, Badan POM juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina.

**4. 27 November 2019 : Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Universitas Airlangga tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Rektor Universitas Airlangga menandatangani kesepakatan bersama di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 27 November 2019. Kesepakatan bersama ini mencakup kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan penekanan pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. UNAIR memiliki kontribusi cukup besar bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang pengembangan obat dan makanan.

Selain itu, UNAIR juga memiliki banyak peneliti dan ahli yang aktif berinovasi dalam pengembangan obat. Badan POM mendukung penuh UNAIR dalam pengembangan riset di bidang kesehatan. Berbagai upaya pendampingan oleh BPOM dilakukan dalam rangka percepatan agar berbagai macam produk inovatif yang UNAIR hasilkan bisa diterima oleh masyarakat, serta memberi *impact* dan manfaat bagi bangsa dan negara secara legal.

Badan POM berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan terhadap pihak industri atau pelaku usaha. Hal ini sebagai langkah negara dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016, untuk mendorong percepatan pengembangan bahan baku obat, produk bioteknologi, obat bahan alam, dan vaksin dengan pemanfaatan sumber daya lokal.

**5. 3-5 Desember 2019 : Kunjungan AIFAESA Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) ke Laboratorium PPPOMN**

Dalam rangka menindaklanjuti Program Dukungan Badan POM dalam membangun sistem pengawasan keamanan pangan di Timor-Leste di bawah rangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang telah dilaksanakan pada Juli 2018 dan Mei 2019, Badan POM telah memfasilitasi Kunjungan Badan Inspeksi Aktivitas Perekonomian, Sanitasi dan Pangan, Institusi Publik (*Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, Institusi Publik / AIFAESA, I.P.*) Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) ke Badan POM, industri dan ritel pangan. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas tindak lanjut kerja sama antara Badan POM dan AIFAESA serta finalisasi *draft* MoU antara kedua lembaga. Pada kunjungan ke Laboratorium PPPOMN, pihak AIFAESA bertemu dengan perwakilan Badan POM yang dipimpin oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun pertemuan tersebut membahas perkembangan persiapan penandatanganan MoU antara Badan POM dan AIFAESA, tindak lanjut kerja sama terkait permintaan bantuan pelatihan di Badal Besar POM di Denpasar dan pengujian sampel produk RDTL di Laboratorium Badan POM, serta tindak lanjut keikutsertaan dalam Sidang Codex di Yogyakarta. Selain itu, Badan POM juga memfasilitasi kunjungan ke PT. Frisian Flag Indonesia, pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) serta kunjungan ke *Carrefour* kota Kasablanka.

#### 6. 15-17 Desember 2019 : Kunjungan Kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

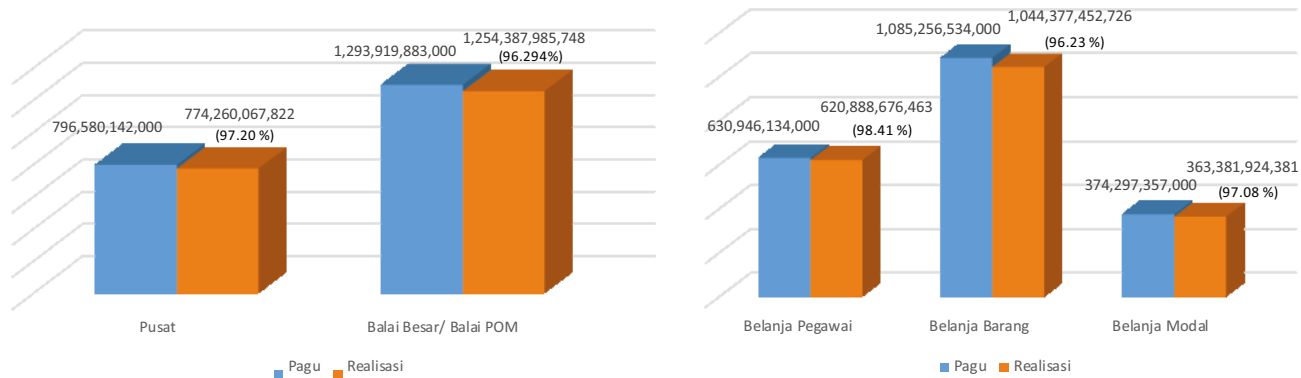
Pada tanggal 15-17 Desember 2019, Kepala Badan POM melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk menghadiri Pertemuan *the 7<sup>th</sup> Session of the Islamic Conference of Health Ministers (ICHM)* dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dr. Yousef Ahmed Al-Othaimen dalam kapasitas sebagai Tuan Rumah dan Ketua Biro Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI. Pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (*Senior Officials Meeting/SOM*), Kepala Badan POM berkesempatan menyampaikan pandangan mengenai *Report of the Meeting of Heads of the National Medicines Regulatory Authority (NMRAs) from the OIC Member States*. Adapun hasil Pertemuan Pertama OIC NMRAs yaitu Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI tahun 2019 – 2021 juga telah berhasil diadopsi ke dalam Resolusi No. 4/7-ICHM mengenai “*Self-Reliance in Supply and Production of Medicines, Vaccines and Medical Technologies*”. Selain itu, Badan POM juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra yaitu: (i) *Assistant Secretary General (ASG) for Science and Technology*, Duta Besar Askar Mussinov; (ii) *Assistant Undersecretary for Public Health Policy and Licence*, Kementerian Kesehatan UEA, Dr. Amin Hussain Al Amiri; (iii) Menteri Kesehatan Palestina; dan (iv) pihak industri farmasi PT. Hetero Group di Dubai. Badan POM juga turut mendampingi Bapak Menteri Kesehatan RI pada sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam.

#### 7. Penandatanganan Grant Agreement dan Joint Workplan Biennium antara Badan POM dengan WHO tahun 2020-2021

Badan POM bersama perwakilan WHO di Indonesia telah melakukan penandatanganan *Grant Agreement* dan *Joint Workplan Biennium WHO 2020-2021* dalam rangkaian kegiatan refleksi tahun 2019 dan *outlook 2020* pada tanggal 19 Desember 2019. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan POM dan *WHO Representative to Indonesia* (Dr. Paranietharan) yang dilanjutkan dengan penyerahan laporan akhir *Pilot Project* Pelaporan Obat Substandard dan Palsu secara simbolis. *Grant Agreement on Improved Access to Essential Medicines and Vaccines* merupakan komitmen WHO yang diberikan kepada Badan POM berupa dukungan pendanaan sebesar 575.000 USD dalam penguatan Kapasitas Badan POM termasuk laboratorium untuk memperbaiki akses obat dan vaksin sejalan dengan *the 13<sup>th</sup> General Programme of Work (GPW13)* yang merupakan rencana strategis WHO periode 2019 dengan prioritas pertama *One Billion More People Benefitting from Universal Health Coverage* serta sejalan dengan program kegiatan dalam RPJMN 2020-2024.

## IX. Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2019, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp2.090.500.025.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp2.028.648.053.570,- (97,04%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp774.260.067.822,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp1.254.387.985.748,-



## X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2019. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 sebagaimana terlampir pada buku ini.

## PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2015-2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

# LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	81	nilai	80.12	98.91
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	81	nilai	78.60	97.04
1.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	61	Indeks	81	131.98
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71	%	74	104.66
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	Dokumen	109	119.78
		Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	60	Indeks	60	100.00
		Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	Kerjasama	3	100.00
		Nilai AKIP Biro Kerjasama	81	nilai	72	89.36
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	nilai	4.86	97.2
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72.4	nilai	66.53	91.89
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	nilai	81.7	133.93
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	nilai	WTP	100.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25	nilai	96.19	112.83
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100	%	100	100.00
		Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	100.00
		Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	100.00
		Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	nilai	77.35	95.49
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	nilai	3.20	106.67
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4.3	nilai	4.32	100.46
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4.3	nilai	4.12	95.81
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61	Indeks	82.27	134.87
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100	%	100	100.00
		Ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	ratio	100	100.00
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	100	100.00
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	%	100	100.00
		Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81	nilai	73.44	90.67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	76	Indeks	77.08	101.42
		Indeks kepuasan wartawan	61	Indeks	73.00	119.67
		Indeks Opini Publik BPOM	65	Indeks	85.20	131.08
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Humas dan DSP	65	Indeks	76.64	117.91
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Humas dan DSP	100	%	100.00	100.00
		Persentase KIE yang dilaksanakan terhadap target	100	%	118.46	118.46
		Rasio pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87	%	99.58	114.46
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon 1	65	Indeks	78.10	120.15
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93	%	95.65	102.85
		Persentase permintaan informasi dari media yang ditindaklanjuti	61	%	67.47	110.61
1.5	Pengelolaan SDMBPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13.22	nilai	13.10	99.09
		Indeks kepuasan layanan rumah tangga	3.2	indeks	3.29	102.81
		Indeks kepuasan layanan kepegawaian	3.2	indeks	3.27	102.19
		Nilai AKIP Biro Humas dan DSP	81	nilai	74.63	92.14

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM	100	%	99.33	99.33
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85	%	97.93	115.21
		Persentase SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai perencanaan	72	%	87.53	121.57
		Nilai AKIP Biro Umum dan SDM	81.00	nilai	70.36	86.86
1.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi terhadap total SDM	75	%	75.65	100.87
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3.85	nilai	3.87	100.52
		Persentase ketersediaan dokumen Pengembangan Kompetensi terhadap rencana induk Pengembangan Kompetensi	66	%	67.65	102.50
		Persentase SDM yang dinilai kompetensinya terhadap target SDM yang dinilai pada tahun berjalan	90	%	103.98	115.53
		Persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya terhadap total SDM BPOM	75	%	88.74	118.32
		Nilai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sesuai Kirk Patrick	3.88	Nilai	4.34	111.86
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	75	%	90.00	120.00
		Nilai Akreditasi Lembaga Diklat	C	Nilai	77.60	109.30
		Nilai AKIP PPSDM POM	81	Nilai	76.65	94.63

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100	%	100.00	100.00
		Nilai SPBE	2.7	Nilai	2.44	90.37
		SLA Layanan TIK	100	Nilai	100.00	100.00
		Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60	%	62.50	104.17
		Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68	%	100.00	147.06
		Persentase sistem informasi yang sesuai standar	40	%	40.00	100.00
		Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100	%	100.00	100.00
		Sertifikat ISO 27001	1	Sertifikat	1.00	100.00
		Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100	%	100.00	100.00
		Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100	%	100.00	100.00
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100	%	20.00	20.00
		Nilai performa website BPOM	75	%	68.73	91.64
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	nilai	74.04	91.41
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.1	Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan Pengelolaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai	77.46	107.58
		Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik	87	%	86.05	98.91
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan	90	%	100.00	111.11
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nilai RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	10	Nilai	9.24	92.4
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.60	Nilai	8.22	95.58
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84.00	Indeks	81.42	96.93
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/ WBBM	12.00	Unit Kerja	11.00	91.67
3.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80	%	88.89	111.11
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	Indeks	81.79	99.74
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	100.00	108.70
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90		82.36	91.51
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	23.00	100.00
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material (WTP)	100	%	100.00	100.00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80	%	94.24	117.80

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85	%	91.08	107.15
		Nilai AKIP Inspektorat I	81	Nilai	78.14	96.47
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11.5	Nilai	11.15	96.96
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90	%	100.00	111.11
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75	%	100.00	133.33
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	Indeks	81.07	98.87
		Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90.5	Nilai	90.43	99.92
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75	%	100.00	133.33
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	12	Unit Kerja	11.00	91.67
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	100.00	108.70
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100	%	100.00	100.00
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85	%	99.81	117.42
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85	%	84.09	98.93
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85	Nilai	79.00	92.94

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	23.00	100.00
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100	%	100.00	100.00
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85	%	86.00	101.18
		Nilai AKIP	81	Nilai	78.38	96.77
		Level Kapabilitas APIP	level 3	Level	Level 3	100.00
<b>4</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>61</b>	<b>Indeks</b>	<b>64.96</b>	<b>106.49</b>
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	75.06	123.05
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	46.95	Rasio	40.32	85.88
		Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	50	%	12.50	25.00
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks POM	71	Indeks	71.84	101.18
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94	%	97.73	103.97
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60	%	85.17	141.95
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80	%	84.24	105.30
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87	%	94.68	108.83

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	%	74.52	104.96
		Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	Indeks	81.78	134.07
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	Indeks	68.78	104.21
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	75.06	123.05
		Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	%	98.15	98.15
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	41.8	%	41.39	99.02
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	49.8	%	60.46	121.41
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	%	95.51	115.07
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM	46.95	Rasio	43.92	93.55
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	%	59.50	119.00
		Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81	Nilai	76.77	94.78
4.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100	%	100.00	100.00
		Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2	dokumen	2.00	100.00
		Persentase kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman dan sesuai prosedur	20	dokumen	20.00	100.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	3	kajian	3.00	100.00
		Persentase pelaku usaha/komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan	80	%	91.30	114.13
		Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur	12	dokumen	12.00	100.00
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81	nilai	73.53	90.78
4.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	75	%	72.06	96.08
		Persentase laporan intelijen obat dan makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75	%	83.82	111.76
		Jumlah profil jaringan intelijen obat dan makanan	2	dokumen	2.00	100.00
		Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat	50	%	52.05	104.10
		Persentase kegiatan intelijen yang akurat	70	%	41.92	59.89
		Jumlah jejaring intelijen di bidang obat dan makanan	7	jejaring	7.00	100.00
		Jumlah <i>basic descriptive intelligent</i> di bidang obat dan makanan yang akurat	18	dokumen	18.00	100.00
		nilai AKIP Direktorat Intelijen	81	nilai	73.08	90.22
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	23.5	%	38.68	164.60
		Persentase sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66	%	70.80	107.27

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85	%	85.20	100.24
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	85	%	94.68	111.39
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	76	Indeks	84.25	110.86
		Indeks kepatuhan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	82.04	134.49
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	82.04	134.49
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	87	%	93.66	107.66
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan	61	%	93.15	152.70
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	65.44	116.86
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	73.86	121.08
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	98.66	118.87
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	nilai	76.51	94.46

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang memenuhi ketentuan	62	%	61.00	98.39
		Persentase Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi baru yang memenuhi syarat	87	%	83.15	95.57
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan teknologi Baru	79.17	Indeks	84.03	106.14
		Indeks kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	70	Indeks	77.10	110.14
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait pengawasan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	76.7	%	100.00	130.38
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diberikan	80	%	94.33	117.91
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang dilaksanakan	27	%	30.27	112.11
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru yang diselesaikan tepat waktu	94	%	94.91	100.97
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	92	%	97.69	106.18

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan Pangan risiko tinggi dan teknologi baru	65	%	69.70	107.23
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Progra Manajemen Risiko	15	%	15.00	100.00
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	81	Nilai	75.86	93.65
4.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	63	%	61.52	97.65
		Persentase kosmetik yang memenuhi ketentuan	93	%	84.24	90.58
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	61	indeks	81.29	133.26
		Indeks kepatuhan sarana produk kosmetik	61	indeks	80.31	131.66
		Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik	61	indeks	80.31	131.66
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	%	94.95	107.90
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	62	%	65.21	105.18
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetik	62	%	63.64	102.65
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	62	%	61.95	99.92
		Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	67	%	68.48	102.21
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	Nilai	76.01	93.84

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase kesesuaian pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP oleh BB/BPOM dan Loka POM	65	%	69.23	106.51
		indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	76	%	86.36	113.63
		Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	95	%	92.30	97.16
		Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	Teknologi Informasi	1.00	100.00
		Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	600	pelaku usaha	620.00	103.33
		Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	80	%	88.16	110.20
		Jumlah petugas BB/BPOM, Petugas Lintas Sektor, dan Pengelola Saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	600	petugas	703.00	117.17
		nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81	Nilai	77.54	95.73
		4.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang ditindaklanjuti	55	%
Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	72			Indeks	83.72	116.28

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepatuhan pelaku usaha obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor	55	Indeks	98.63	179.33
		Indeks kepatuhan industri rokok dalam ketentuan iklan dan label produk tembakau	55	Indeks	45.85	83.36
		Persentase penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	99	%	97.33	98.31
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	87	Nilai	60.85	69.94
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang dilaksanakan	55	%	70.40	128.00
		Persentase tindak lanjut pengawasan mutu, label, iklan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	55	%	52.87	96.13
		Persentase laporan farmakovigilans yang ditindaklanjuti	75	%	78.82	105.09
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	75000	Iklan dan label	61,378	81.84
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	Nilai	74.56	92.05

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	36.90	76.88
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	66.34	138.21
		Persentase Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi syarat	85	%	72.14	84.87
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	72	Indeks	86.99	120.82
		Indeks kepatuhan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	Indeks	77.10	140.18
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	Indeks	77.10	140.18
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	%	100.00	111.11
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait produk Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	%	100.00	111.11
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan produk/sampling Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang dilaksanakan	55	%	55.01	100.02
		Persentase keputusan hasil pengawasan pangan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan tepat waktu	94	%	94.04	100.04

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82	%	81.52	99.41
		Nilai AKIP Dit.PRRS	81	Nilai	72.41	akhir tahun
4.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	70	%	80.58	115.11
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat, NPP	82	indeks	83.27	101.55
		Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13	industri	13.00	100.00
		Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	60	%	73.18	121.97
		Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80	%	90.72	113.40
		Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	90	%	88.89	98.77
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	81	nilai	74.71	92.23
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	87	%	86.40	99.31
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	79	Indeks	83.96	106.28
		Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	76	%	95.88	126.16
		Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan	6	Dokumen	6.00	100.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu.	65	%	71.90	110.62
		Persentase keputusan Registrasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	%	80.53	98.21
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	75	indeks	76.93	102.57
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	75	indeks	79.81	106.41
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	75	indeks	76.49	101.99
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Penilaian Uji Pra Klinik/ Klinik dan DIP	75	indeks	86.75	115.67
		Persentase kesesuaian dokumen registrasi OT, SK dan notifikasi Kosmetik terhadap persyaratan yang ditetapkan	88	%	92.55	105.17
		Jumlah dokumen identifikasi registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	7	Dokumen	7.00	100.00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	69	Rasio	69.09	100.13
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	69	Rasio	75.80	109.86
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	69	Rasio	68.23	98.88
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang penilaian Uji PraKlinik / Klinik dan DIP	69	Rasio	86.54	125.42

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.9	Nilai	0.98	108.80
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00
		Tingkat efektivitas pendampingan	87	%	88.66	101.91
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Nilai	76.37	94.28
4.12	Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diterbitkan tepat waktu terhadap obat yang diselesaikan	67	%	76.96	114.87
		Persentase keputusan evaluasi pengembangan obat yang diterbitkan tepat waktu	82	%	89.87	109.60
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	78	Indeks	79.93	102.47
		Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi obat	25	%	25.18	100.72
		Jumlah usulan penyusunan/revisi pedoman, standar, kriteria dan prosedur registrasi Obat	3	Jumlah	3.00	100.00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi obat	68	Rasio	75.87	111.57
		Jumlah pelayanan konsultasi dan advokasi registrasi obat	120	Jumlah	183.00	152.50
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	71	Nilai	87.06	122.62
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Obat	81	Nilai	74.58	92.07
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, yang diselesaikan tepat waktu	75	%	70.53	94.04

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat efektivitas pendampingan (indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pendampingan/ bimbingan/ pembinaan)	75	nilai	80.94	107.92
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	70.5	%	83.23	118.06
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	81	nilai	76.87	94.90
4.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dimanfaatkan	80	%	80.00	100.00
		Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80	%	100.00	125.00
		Persentasi permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan Manfaat Obat Tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	75	%	97.22	129.63
		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan standar OT, SK dan Kosmetik	10	dokumen	10.00	100.00
		Persentasi sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	100.00	125.00
		Persentase standar OT, SK, dan Kosmetik yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	80	%	110.00	137.50
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	81	Nilai	75.05	92.65

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.15	Standardisasi Pangan Olahan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	%	100.00	100.00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	85	Indeks	83.27	97.96
		Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90	Indeks	100.00	111.11
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80	%	93.30	116.63
		Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	14	Standar	100.00	714.29
		Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	100.00	125.00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100	%	100.00	100.00
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81	Nilai	76.25	94.14
4.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase Standar Obat dan NAPPZA yang dimanfaatkan	80	%	76.92	96.15
		Persentase Rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	%	100.00	142.86
		Indeks kesesuaian standar Obat NAPPZA	80	Indeks	92.31	115.39
		Indeks kesesuaian rancangan standar Obat NAPPZA	80	Indeks	75.00	93.75
		Jumlah kebutuhan standar Obat NAPPZA	13	Kebutuhan standar	13.00	100.00
		Persen sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	%	84.62	105.78

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	76.92	96.15
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA	81	Nilai	75.22	92.86
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan	75	%	82.55	110.07
		Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	61	Indeks	77.10	126.39
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	68	Indeks	70.00	102.94
		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	30	%	30.12	100.40
		Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	80	%	92.86	116.08
		Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	2	%	2.04	102.00
		Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan	80	%	100.00	125.00
		Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha	81	Nilai	70.68	87.26
4.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase peningkatan kemampuan pengujian Laboratorium BPOM terhadap standar/peraturan yang ditetapkan	80	%	87.00	108.75
		Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar Good Laboratory Practices yang ditetapkan	85	%	83.87	98.67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap standar	65	%	68.90	106.00
		Persentase pemenuhan Baku Pembanding sesuai kebutuhan	73	%	74.79	102.45
		Persentase alat laboratorium B POM yang dikalibrasi terhadap standar yang ditetapkan	72	%	70.78	98.31
		Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai Service Level Agreement	90	%	94.69	105.21
		Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	%	82.41	82.41
		Nilai AKIP PPPOMN	81	Nilai	75.05	92.65
		Status akreditasi	1		1.00	100.00
4.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan	50	Indeks	53.13	106.26
		Persentase perkara obat dan makanan ilegal yang terungkap aktor Intelektualnya	50	%	60.00	120.00
		Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	0.7	nilai	0.67	95.71
		persentase penyelesaian perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	65	%	56.25	86.54
		Nilai AKIP Direktorat Penyidikan	81	Nilai	74.07	91.44
4.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase hasil riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi	100	%	100.00	100.00
		Jumlah dokumen rencana induk riset dan kajian Obat dan Makanan	1	Dokumen	1.00	100.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk	100	%	100.00	100.00
		Persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan timeline	100	%	85.71	85.71
		Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholder	100	%	100.00	100.00
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81	Nilai	74.96	92.54

# LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019  
SUMBER: APLIKASI OMSPAN  
(Per 31 Desember 2019)

## A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>386,738,331,000</b>	<b>376,411,504,877</b>	<b>97.33%</b>
3158	BIRO KERJASAMA	7,525,900,000	7,332,792,617	97.43%
3159	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	28,279,300,000	27,396,350,057	96.88%
4110	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	12,429,149,000	11,994,304,152	96.50%
4111	BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29,000,000,000	27,305,012,964	94.16%
	BIRO UMUM DAN SDM	309,503,982,000	302,383,045,087	97.70%
3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	73,034,052,000	72,810,466,925	99.69%
4112	Pengelolaan SDM BPOM	236,469,930,000	229,572,578,162	97.08%
<b>2</b>	<b>445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF</b>	<b>51,836,895,000</b>	<b>51,249,311,990</b>	<b>98.87%</b>
4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9,833,970,000	9,753,759,928	99.18%
4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11,025,670,000	10,907,332,208	98.93%
4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	10,254,400,000	10,042,827,340	97.94%
4127	DIT. REGISTRASI OBAT	10,810,000,000	10,746,332,722	99.41%
4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9,912,855,000	9,799,059,792	98.85%
<b>3</b>	<b>445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK</b>	<b>41,096,377,000</b>	<b>40,978,054,946</b>	<b>99.71%</b>
4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12,366,155,000	12,344,964,652	99.83%
4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	11,240,866,000	11,182,573,925	99.48%
4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11,334,528,000	11,298,207,431	99.68%
4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6,154,828,000	6,152,308,938	99.96%
<b>4</b>	<b>445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN</b>	<b>58,870,422,000</b>	<b>58,334,309,215</b>	<b>99.09%</b>
4120	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9,553,024,000	9,496,193,251	99.41%
4124	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAM RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14,922,142,000	14,738,545,564	98.77%
4126	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8,979,000,000	8,937,801,759	99.54%
4130	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	10,728,621,000	10,607,182,127	98.87%
4132	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14,687,635,000	14,554,586,514	99.09%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
5	<b>632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN</b>	<b>41,432,389,000</b>	<b>40,847,221,491</b>	<b>98.59%</b>
	4117 DIT. PENGAMANAN	22,033,980,000	21,649,324,656	98.25%
	4118 DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9,250,000,000	9,152,607,472	98.95%
	4134 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	10,148,409,000	10,045,289,363	98.98%
6	<b>INSPEKTORAT UTAMA</b>	<b>24,673,283,000</b>	<b>24,295,420,238</b>	<b>98.47%</b>
	4115 INSPEKTORAT I	17,982,393,000	17,701,266,364	98.44%
	4116 INSPEKTORAT II	6,690,890,000	6,594,153,874	98.55%
7	4133 <b>PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL</b>	<b>66,829,928,000</b>	<b>62,178,744,352</b>	<b>93.04%</b>
8	4135 <b>PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>24,639,510,000</b>	<b>22,941,183,170</b>	<b>93.11%</b>
9	4114 <b>PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>58,920,632,000</b>	<b>56,562,807,309</b>	<b>96.00%</b>
10	4113 <b>PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>41,542,375,000</b>	<b>40,461,510,234</b>	<b>97.40%</b>
<b>TOTAL SATKER PUSAT</b>		<b>796,580,142,000</b>	<b>774,260,067,822</b>	<b>97.20%</b>

## B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45,389,210,000	44,577,730,396	98.21%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	65,523,335,000	63,218,058,814	96.48%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	63,084,274,000	62,279,364,179	98.72%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39,762,982,000	39,456,980,329	99.23%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	68,026,654,000	66,542,019,098	97.82%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	36,021,597,000	35,389,275,010	98.24%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	55,570,439,000	51,083,105,571	91.92%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	50,053,012,000	49,268,997,391	98.43%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	43,670,561,000	42,881,497,844	98.19%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	33,817,836,000	32,065,736,672	94.82%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	43,041,245,000	42,413,963,910	98.54%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	32,925,185,000	31,661,635,667	96.16%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	32,326,115,000	31,548,802,456	97.60%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	28,833,936,000	28,401,599,857	98.50%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	58,027,016,000	56,443,737,038	97.27%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31,393,359,000	31,287,068,475	99.66%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	39,801,690,000	39,149,390,497	98.36%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	31,790,591,000	31,204,680,418	98.16%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	58,946,864,000	56,978,012,454	96.66%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	32,830,702,000	31,570,900,325	96.16%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	35,377,175,000	30,162,498,777	85.26%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	42,547,747,000	41,608,233,760	97.79%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	35,365,190,000	34,622,948,257	97.90%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	38,679,607,000	37,623,211,574	97.27%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	40,313,961,000	39,321,882,517	97.54%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	31,795,837,000	31,111,161,991	97.85%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	35,020,167,000	34,358,976,583	98.11%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	27,292,082,000	26,496,583,408	97.09%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	23,418,792,000	21,953,070,575	93.74%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	19,455,957,000	19,142,549,303	98.39%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	30,105,045,000	28,159,779,979	93.54%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	26,676,166,000	25,889,950,235	97.05%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	17,035,554,000	16,514,582,388	96.94%
TOTAL SATKER DAERAH		<b>1,293,919,883,000</b>	<b>1,254,387,985,748</b>	<b>96.94%</b>
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		<b>2,090,500,025,000</b>	<b>2,028,648,053,570</b>	<b>97.04%</b>





BADAN POM

**KINERJA** **BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2019



Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



Bpom RI